

Independensi Bank Indonesia dan Politik Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Independensi yang kuat • Stabilitas yang terjaga • Pertumbuhan yang inklusif



**STABILITAS
MONETER**



Menjaga stabilitas harga
dan sistem keuangan.



**NILAI
RUPIAH**



Menjaga stabilitas nilai
tukar Rupiah.



**INFLASI
TERKENDALI**



Inflasi rendah dan stabil
mendukung daya beli.



**KOORDINASI
KEBIJAKAN**



Sinergi Bank Sentral
dan Pemerintah.



**INVESTASI &
KEPERCAYAAN**



Iklim investasi kondusif,
kepercayaan meningkat.



**PERTUMBUHAN
BERKELANJUTAN**



Pertumbuhan inklusif untuk
kesejahteraan masyarakat.

BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN • EKONOMI YANG KUAT • INDONESIA MAJU

*Rudy C Tarumingkeng: Independensi Bank Indonesia dan Politik
Pertumbuhan Ekonomi Nasional*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

9 Juni 2026

INDEPENDENSI BANK INDONESIA DAN POLITIK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Abstrak

Independensi bank sentral merupakan salah satu pilar penting tata kelola ekonomi modern. Dalam konteks Indonesia, independensi Bank Indonesia lahir dari pengalaman krisis moneter 1997–1998, ketika dominasi fiskal, lemahnya tata kelola perbankan, tekanan politik, dan rapuhnya nilai tukar memperlihatkan betapa mahal biaya ketidakstabilan moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menandai perubahan mendasar dengan menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, memiliki tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain, kecuali yang secara tegas diatur undang-undang. Reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas kerangka tata kelola, koordinasi, akuntabilitas, dan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Artikel ini membahas hubungan antara independensi Bank Indonesia dan politik pertumbuhan ekonomi nasional. Argumen utama tulisan ini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak dapat dibangun melalui pelemahan independensi moneter, melainkan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan kredibilitas institusi. Politik pertumbuhan sering mendorong pemerintah mengejar ekspansi ekonomi jangka pendek, tetapi

bank sentral harus menjaga agar dorongan tersebut tidak berubah menjadi inflasi, depresiasi nilai tukar, defisit kepercayaan, atau instabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, independensi Bank Indonesia bukanlah hambatan bagi pertumbuhan, melainkan prasyarat bagi pertumbuhan yang stabil, kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bank Indonesia, independensi bank sentral, pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, inflasi, nilai tukar, politik ekonomi, UU P2SK, kredibilitas kebijakan.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional selalu menjadi tema sentral dalam politik pembangunan Indonesia. Setiap pemerintahan menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, memperkuat daya beli, dan mempercepat transformasi struktural. Dalam masyarakat demokratis, tuntutan tersebut wajar karena legitimasi politik sering diukur melalui kemampuan pemerintah menghadirkan kesejahteraan nyata. Namun, sejarah ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dikejar tanpa disiplin stabilitas dapat berubah menjadi pertumbuhan semu: tampak tinggi dalam jangka pendek, tetapi rapuh karena ditopang oleh ekspansi kredit berlebihan, pembiayaan defisit yang tidak sehat, inflasi tersembunyi, atau pelemahan nilai tukar.

Di sinilah peran Bank Indonesia menjadi penting. Sebagai bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengelola kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sendiri menjelaskan bahwa fungsi utamanya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. ([Bank Indonesia](#)) Tujuan tersebut bukan sekadar tujuan teknokratik, melainkan fondasi sosial-ekonomi. Nilai rupiah yang stabil berarti harga-

harga lebih terkendali, daya beli masyarakat lebih terlindungi, perencanaan bisnis lebih pasti, investasi lebih mudah dihitung, dan risiko sosial akibat inflasi tinggi dapat ditekan.

Independensi Bank Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan respons historis terhadap krisis moneter Asia 1997–1998 dan kelemahan kelembagaan yang sebelumnya memungkinkan bank sentral terlalu dekat dengan kepentingan fiskal dan politik jangka pendek. Ikhtisar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perubahan fundamental dalam UU tersebut mencakup tujuan tunggal Bank Indonesia serta independensi dari segi kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan, dan anggaran. ([OJK Portal](#)) Dengan kata lain, independensi BI adalah desain institusional untuk mencegah kebijakan moneter dijadikan alat pembiayaan politik atau alat dorong pertumbuhan jangka pendek yang mengorbankan stabilitas.

Namun, hubungan antara independensi bank sentral dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sederhana. Pemerintah membutuhkan kebijakan moneter yang mendukung pembiayaan pembangunan, kredit sektor riil, stabilitas pasar keuangan, dan investasi. Di sisi lain, Bank Indonesia harus menjaga agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak menimbulkan inflasi, gejolak nilai tukar, moral hazard, atau dominasi fiskal. Ketegangan ini dapat disebut sebagai “politik pertumbuhan ekonomi nasional”: ruang tarik-menarik antara kebutuhan ekspansi ekonomi, tekanan politik elektoral, kebutuhan pembiayaan negara, dan disiplin stabilitas makroekonomi.

Indonesia memasuki fase baru perdebatan ini setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Undang-undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan secara luas, termasuk kelembagaan, perbankan, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, stabilitas sistem keuangan, literasi dan inklusi keuangan, akses pembiayaan UMKM, keuangan berkelanjutan, dan koordinasi antarlembaga sektor keuangan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#)) Bank Indonesia menyatakan bahwa UU P2SK memberikan dasar

hukum yang kuat bagi mandat, kebijakan, kelembagaan, dan penguatan tata kelola BI. ([Bank Indonesia](#)) Dalam kerangka terbaru tersebut, tujuan tata kelola BI dirumuskan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ([Bank Indonesia](#))

Masalahnya, semakin luas mandat bank sentral, semakin besar pula kebutuhan untuk memperjelas batas antara koordinasi dan intervensi. Koordinasi diperlukan karena inflasi, nilai tukar, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan tidak dapat dikelola oleh satu lembaga saja. Namun, intervensi politik terhadap keputusan suku bunga, operasi moneter, pembelian surat berharga, atau pengelolaan nilai tukar dapat mengurangi kredibilitas bank sentral. Literatur klasik menunjukkan bahwa bank sentral yang lebih independen cenderung lebih efektif menjaga inflasi rendah dan stabil, sementara kontrol politik terhadap bank sentral sering dikaitkan dengan inflasi yang lebih tinggi dan volatilitas harga. Alesina dan Summers menemukan bahwa bank sentral yang secara politik lebih terkontrol cenderung terkait dengan inflasi yang lebih tinggi dan lebih tidak stabil, sementara dampaknya terhadap pertumbuhan riil tidak terbukti besar. ([IDEAS/RePEc](#))

Tulisan ini menelaah pertanyaan mendasar: bagaimana menjaga independensi Bank Indonesia dalam konteks politik pertumbuhan ekonomi nasional? Jawaban yang diajukan ialah bahwa Indonesia tidak perlu memilih secara dikotomis antara stabilitas dan pertumbuhan. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan yang sehat, sedangkan pertumbuhan yang produktif memperkuat stabilitas. Bank Indonesia perlu independen dalam instrumen dan penilaian profesionalnya, tetapi tetap akuntabel, transparan, dan terkoordinasi dengan pemerintah. Pemerintah perlu aktif mendorong pertumbuhan melalui reformasi struktural, kebijakan fiskal yang kredibel, industrialisasi, hilirisasi, pendidikan, infrastruktur, UMKM, dan transformasi

digital, tetapi tidak menekan bank sentral agar mengorbankan stabilitas demi target jangka pendek.

2. Kerangka Konseptual: Independensi Bank Sentral

Independensi bank sentral dapat dipahami sebagai kebebasan institusional bank sentral untuk menjalankan mandatnya tanpa tekanan politik jangka pendek. Independensi bukan berarti bank sentral berdiri di luar sistem demokrasi. Bank sentral tetap lembaga publik yang harus tunduk pada undang-undang, menyampaikan pertanggungjawaban, membuka informasi kebijakan, dan menjalankan tata kelola yang transparan. Yang dijaga adalah agar keputusan teknis moneter tidak ditentukan oleh kepentingan politik sesaat.

Dalam literatur ekonomi politik, terdapat beberapa dimensi independensi bank sentral. Pertama, **independensi tujuan**, yaitu kewenangan bank sentral untuk menetapkan tujuan akhir kebijakan. Tidak semua negara memberikan independensi tujuan penuh. Banyak negara menetapkan tujuan bank sentral melalui undang-undang, misalnya stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, atau stabilitas sistem keuangan. Kedua, **independensi instrumen**, yaitu kebebasan bank sentral memilih instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inilah inti independensi modern: pemerintah dan DPR boleh menetapkan mandat melalui undang-undang, tetapi bank sentral harus memiliki ruang profesional untuk menentukan suku bunga, operasi moneter, kebijakan makroprudensial, dan intervensi pasar sesuai analisis ekonomi.

Ketiga, **independensi personalia**, yaitu perlindungan terhadap pimpinan bank sentral agar tidak mudah diberhentikan karena keputusan kebijakan yang tidak populer. Jika gubernur bank sentral dapat diberhentikan hanya karena menaikkan suku bunga menjelang pemilu, independensi akan menjadi formalitas belaka. Keempat, **independensi keuangan**, yaitu kemampuan bank sentral mengelola anggaran dan neraca sendiri tanpa

ketergantungan politik harian. Kelima, **independensi kelembagaan**, yaitu posisi hukum bank sentral sebagai lembaga negara yang tidak berada di bawah kementerian tertentu.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur undang-undang. ([OJK Portal](#)) UU tersebut juga mewajibkan Bank Indonesia menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugasnya. ([OJK Portal](#)) Formulasi ini penting karena menegaskan bahwa independensi bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban. BI bukan hanya “boleh” independen, melainkan harus menjaga dirinya dari intervensi yang dapat mengganggu mandat stabilitas.

Namun, independensi tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas. Semakin besar kewenangan teknokratis bank sentral, semakin besar pula tuntutan agar bank sentral menjelaskan alasan kebijakannya kepada publik. Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa prinsip sistem tata kelolanya mencakup Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi atau IKKAT. ([Bank Indonesia](#)) Prinsip ini menunjukkan bahwa independensi tidak diposisikan berlawanan dengan koordinasi dan akuntabilitas. Bank sentral yang independen harus tetap menjelaskan keputusan, membuka data, menyampaikan laporan, dan membangun komunikasi publik.

Secara konseptual, independensi bank sentral dibutuhkan karena politik demokratis memiliki kecenderungan jangka pendek. Pemerintah dan parlemen sering menghadapi tekanan untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas belanja, menurunkan bunga kredit, menjaga kurs secara artifisial, atau menunda penyesuaian harga yang tidak populer. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut tampak menarik. Namun, jika dilakukan tanpa disiplin, dampaknya dapat berupa inflasi, defisit transaksi berjalan,

tekanan cadangan devisa, pelemahan mata uang, dan hilangnya kepercayaan investor.

Kydland dan Prescott memperkenalkan persoalan **time inconsistency**, yaitu kecenderungan pembuat kebijakan memilih kebijakan yang terlihat optimal hari ini tetapi merusak kredibilitas jangka panjang. Barro dan Gordon kemudian mengembangkan argumen reputasi kebijakan moneter: jika publik percaya bank sentral akan menyerah pada tekanan politik, ekspektasi inflasi akan naik, sehingga biaya pengendalian inflasi menjadi lebih mahal. Rogoff mengusulkan gagasan "conservative central banker", yakni bank sentral yang lebih berkomitmen pada stabilitas harga agar ekspektasi inflasi lebih terkendali. Gagasan ini tidak berarti bank sentral mengabaikan kesejahteraan rakyat, melainkan memastikan bahwa kesejahteraan tidak dihancurkan oleh inflasi yang tidak terkendali.

3. Evolusi Independensi Bank Indonesia dalam Sistem Ekonomi Nasional

Sejarah Bank Indonesia dapat dibaca sebagai perjalanan dari bank sentral yang dekat dengan fungsi pembangunan menuju bank sentral modern yang berfokus pada stabilitas. Pada masa awal pembangunan nasional, bank sentral sering dipahami sebagai bagian dari mesin pembangunan negara. Dalam situasi negara baru merdeka, kebutuhan pembiayaan pembangunan, stabilisasi ekonomi, dan penguatan kedaulatan moneter memang sangat besar. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa ketika bank sentral terlalu terikat pada agenda pembiayaan pemerintah, disiplin moneter menjadi rapuh.

Sebelum reformasi 1998, peran Bank Indonesia tidak sepenuhnya terpisah dari kepentingan pemerintah. Krisis moneter Asia memperlihatkan bahwa kelemahan sistem perbankan, utang luar negeri swasta, nilai tukar yang rapuh, dan tata kelola yang kurang sehat dapat berakumulasi menjadi krisis sistemik. Rupiah mengalami tekanan sangat berat, inflasi melonjak, banyak

bank bermasalah, dan kepercayaan publik merosot. Dalam konteks itu, reformasi bank sentral menjadi bagian dari agenda besar membangun ulang kredibilitas ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjadi titik balik. Ikhtisar UU BI menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia dirumuskan secara tegas sebagai mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, atau **single objective**, berbeda dari UU sebelumnya yang merumuskan tujuan secara umum seperti meningkatkan taraf hidup rakyat. ([OJK Portal](#))

Rasionalitasnya jelas: tujuan yang terlalu luas membuat otoritas bank sentral tidak fokus dan dapat menimbulkan konflik antara tugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan tugas mendorong pertumbuhan. ([OJK Portal](#))

Formulasi tujuan tunggal tersebut tidak berarti pertumbuhan ekonomi tidak penting. Justru sebaliknya, stabilitas nilai rupiah dipahami sebagai syarat dasar agar pertumbuhan dapat berlangsung berkelanjutan. Inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil mengurangi ketidakpastian, memperpanjang horizon investasi, menjaga daya beli rumah tangga, dan mencegah alokasi sumber daya yang spekulatif. Dalam bahasa pembangunan, stabilitas moneter adalah "infrastruktur tak terlihat" bagi pertumbuhan.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa tugas bank sentral semakin kompleks. Krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, digitalisasi pembayaran, perkembangan fintech, risiko iklim, dan volatilitas global membuat bank sentral tidak cukup hanya menjaga inflasi melalui suku bunga. Bank sentral juga harus memahami stabilitas sistem keuangan, transmisi kredit, pasar uang, sistem pembayaran digital, ekspektasi pasar, dan risiko eksternal. Di Indonesia, UU P2SK memperluas kerangka sektor keuangan dan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan melalui kerangka stabilitas sistem keuangan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Dengan demikian, evolusi Bank Indonesia bukanlah perjalanan dari “stabilitas sempit” menuju “pertumbuhan politik”, melainkan dari bank sentral konvensional menuju bank sentral modern yang harus menjaga stabilitas dalam ekosistem keuangan yang semakin kompleks. Mandat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus dibaca dalam kerangka stabilitas, bukan sebagai izin bagi tekanan politik untuk memaksa kebijakan moneter ekspansif setiap saat.

4. Politik Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Politik pertumbuhan ekonomi nasional adalah proses ketika target pertumbuhan menjadi agenda politik, instrumen legitimasi pemerintahan, dan ukuran keberhasilan pembangunan. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka statistik, melainkan simbol keberhasilan negara. Ketika pertumbuhan tinggi, pemerintah dianggap berhasil; ketika pertumbuhan melambat, tekanan politik meningkat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila setiap pemerintahan berupaya menetapkan target pertumbuhan yang ambisius.

Indonesia memiliki kebutuhan objektif untuk tumbuh lebih tinggi. Sebagai negara berpenduduk besar, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja muda, membiayai perlindungan sosial, memperluas kelas menengah, memperkuat industrialisasi, dan menghindari jebakan pendapatan menengah. Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dari 5,03% pada 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan, meskipun secara kuartalan mengalami kontraksi 0,77%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka tersebut menunjukkan resiliensi, tetapi juga mengindikasikan bahwa akselerasi menuju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi membutuhkan lebih dari sekadar stimulus moneter.

Dalam politik ekonomi, selalu ada godaan untuk meminta bank sentral menurunkan suku bunga, memperlonggar likuiditas, membeli surat utang pemerintah, atau menjaga nilai tukar dengan cara yang sangat ekspansif agar pertumbuhan meningkat. Di permukaan, kebijakan ini dapat terlihat pro-rakyat karena bunga rendah dapat mendorong konsumsi dan investasi. Namun, jika dilakukan pada saat inflasi meningkat atau nilai tukar tertekan, hasilnya dapat berbalik: inflasi merusak daya beli, depresiasi meningkatkan biaya impor, investor menuntut premi risiko lebih tinggi, dan beban utang valuta asing membesar.

Perdebatan ini semakin relevan ketika muncul laporan mengenai perubahan legislasi sektor keuangan pada Juni 2026. Reuters melaporkan bahwa parlemen Indonesia mengesahkan legislasi yang memperluas peran Bank Indonesia untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan sektor riil dan penciptaan kerja, sementara sejumlah analis menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi tekanan terhadap independensi bank sentral. ([Reuters](#)) Laporan lanjutan menyebutkan bahwa Bank Indonesia menyiapkan regulasi teknis untuk menyesuaikan diri dengan mandat yang lebih luas tersebut, meskipun teks final undang-undang saat itu belum sepenuhnya tersedia dalam laporan publik. ([Reuters](#)) Dalam membaca perkembangan semacam ini, kehati-hatian akademik diperlukan: dukungan BI terhadap pertumbuhan dapat menjadi positif apabila ditempatkan dalam koridor stabilitas, tetapi dapat berisiko apabila diterjemahkan sebagai subordinasi kebijakan moneter terhadap target politik jangka pendek.

Politik pertumbuhan yang sehat harus membedakan antara **pertumbuhan berbasis produktivitas** dan **pertumbuhan berbasis stimulus nominal**. Pertumbuhan berbasis produktivitas lahir dari peningkatan kualitas SDM, inovasi, teknologi, efisiensi logistik, reformasi birokrasi, infrastruktur, kepastian hukum, akses pembiayaan produktif, hilirisasi bernilai tambah, dan integrasi pasar. Pertumbuhan jenis ini memperbesar kapasitas produksi nasional tanpa harus menimbulkan inflasi tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan

berbasis stimulus nominal sering mengandalkan uang murah, belanja besar, atau ekspansi kredit cepat tanpa peningkatan kapasitas produksi. Pertumbuhan semacam ini mudah memanaskan ekonomi dan akhirnya memaksa bank sentral melakukan pengetatan.

Bank Indonesia dapat mendukung pertumbuhan melalui stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, sistem pembayaran yang efisien, digitalisasi transaksi, kebijakan makroprudensial yang hati-hati, serta koordinasi dengan pemerintah. Namun, Bank Indonesia tidak dapat menggantikan reformasi struktural. Bank sentral tidak dapat sendirian memperbaiki kualitas pendidikan, mempercepat perizinan investasi, menurunkan biaya logistik, memperbaiki tata kelola BUMN, meningkatkan produktivitas pertanian, atau membangun industri teknologi tinggi. Jika seluruh beban pertumbuhan diletakkan pada BI, maka ekspektasi publik menjadi keliru dan risiko kebijakan meningkat.

5. Independensi sebagai Prasyarat Pertumbuhan Berkelanjutan

Argumen pokok artikel ini adalah bahwa independensi Bank Indonesia bukan penghambat pertumbuhan, melainkan prasyarat pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepercayaan. Investor, pelaku usaha, rumah tangga, dan lembaga keuangan membuat keputusan berdasarkan ekspektasi masa depan. Mereka bertanya: apakah inflasi terkendali? Apakah nilai tukar stabil? Apakah suku bunga dapat diprediksi? Apakah bank sentral akan bertindak profesional? Apakah pemerintah akan membiayai defisit dengan cara sehat? Apakah ada risiko intervensi politik terhadap kebijakan moneter?

Jika bank sentral dianggap mudah ditekan, ekspektasi inflasi cenderung memburuk. Pelaku usaha menaikkan harga lebih cepat karena mengantisipasi biaya masa depan. Investor meminta imbal hasil lebih tinggi karena risiko meningkat. Rumah tangga mempercepat konsumsi atau mengalihkan kekayaan ke aset pelindung nilai. Akibatnya, biaya

stabilisasi meningkat. Bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga lebih tinggi daripada yang diperlukan apabila sejak awal kredibilitasnya kuat.

Literatur empiris mendukung pentingnya independensi bank sentral, meskipun tidak semua studi sepakat mengenai besaran dampaknya. Alesina dan Summers menunjukkan bahwa bank sentral yang lebih independen berkaitan dengan inflasi yang lebih rendah dan lebih stabil, tanpa bukti kuat bahwa independensi tersebut mengorbankan pertumbuhan riil. ([IDEAS/RePEc](#)) Studi Indonesia oleh Andriani dan Gai menemukan bahwa indeks independensi hukum Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap inflasi selama periode 1970–2006, sehingga penguatan independensi dipandang penting untuk mencapai target inflasi. ([BMEB](#)) Studi lain dalam konteks negara berkembang juga menunjukkan bahwa independensi bank sentral dapat lebih efektif daripada yang sebelumnya diperkirakan dalam menekan inflasi, terutama ketika institusi politik dan tata kelola mendukung pelaksanaannya. ([PDXScholar](#))

Namun, independensi bukan obat tunggal. Inflasi dapat berasal dari sisi penawaran, seperti pangan, energi, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, atau konflik geopolitik. Dalam kasus seperti itu, bank sentral tidak dapat menanam cabai, membangun gudang beras, atau menurunkan harga minyak dunia. Tetapi bank sentral tetap penting karena dapat mencegah guncangan harga sementara berubah menjadi inflasi umum melalui ekspektasi dan spiral upah-harga. Karena itu, koordinasi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku pasar menjadi sangat penting.

Bank Indonesia dan pemerintah menetapkan sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ untuk 2024–2026, dengan realisasi inflasi 2024 sebesar 1,57% dan 2025 sebesar 2,92%. ([Bank Indonesia](#)) Sasaran inflasi semacam ini bukan hanya angka teknis, melainkan kontrak kredibilitas antara otoritas ekonomi dan masyarakat. Selama publik percaya bahwa bank sentral serius menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, perilaku penetapan harga dan upah menjadi

lebih terkendali. Sebaliknya, jika publik percaya bahwa BI akan selalu mengalah pada tekanan pertumbuhan jangka pendek, ekspektasi inflasi dapat melemah.

Independensi juga penting untuk menjaga nilai tukar. Indonesia adalah ekonomi terbuka yang masih bergantung pada impor energi, bahan baku, barang modal, teknologi, dan pembiayaan eksternal. Depresiasi rupiah yang terlalu tajam dapat meningkatkan biaya impor, memperbesar beban utang valuta asing, dan memicu inflasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, bank sentral yang kredibel dapat menahan kepanikan pasar melalui komunikasi, intervensi terukur, pengelolaan likuiditas, dan kebijakan suku bunga yang konsisten.

Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiganya tidak selalu menghasilkan tepuk tangan politik dalam jangka pendek, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Bank sentral sering harus mengambil keputusan yang tidak populer, misalnya menaikkan suku bunga ketika inflasi meningkat, menahan ekspansi kredit ketika risiko aset menggelembung, atau memperketat likuiditas ketika nilai tukar tertekan. Keputusan seperti itu dapat dikritik karena dianggap menghambat pertumbuhan, tetapi dalam banyak kasus justru mencegah krisis yang jauh lebih mahal.

6. Bahaya Dominasi Fiskal dan Politisasi Moneter

Salah satu risiko terbesar bagi independensi bank sentral adalah **dominasi fiskal**, yaitu kondisi ketika kebijakan moneter dipaksa melayani kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dominasi fiskal dapat terjadi secara eksplisit, misalnya bank sentral diwajibkan membeli surat utang pemerintah di pasar primer atau memberikan kredit langsung kepada pemerintah. Dominasi fiskal juga dapat terjadi secara implisit, misalnya bank sentral ditekan untuk

menjaga suku bunga rendah agar biaya utang pemerintah murah, meskipun kondisi inflasi membutuhkan pengetatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dirancang untuk mencegah risiko tersebut. Ikhtisar UU BI menjelaskan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah karena hal itu dianggap dapat mengganggu keutuhan konsep independensi Bank Indonesia. ([OJK Portal](#)) Ketentuan seperti ini penting karena pembiayaan defisit melalui bank sentral berpotensi menciptakan uang baru tanpa dukungan kapasitas produksi yang memadai. Dalam jangka pendek, pemerintah memperoleh dana murah; dalam jangka menengah, masyarakat membayar melalui inflasi.

Politisasi moneter juga dapat terjadi melalui tekanan terhadap personalia bank sentral. Jika pimpinan BI merasa jabatan mereka terancam karena mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan preferensi politik, maka independensi instrumen melemah. Oleh sebab itu, perlindungan masa jabatan dan prosedur pemberhentian yang ketat menjadi bagian penting dari independensi personalia. OJK mencatat bahwa independensi BI dalam UU mencakup elemen status, kedudukan, tujuan, tugas, manajemen, dan personalia. ([OJK Portal](#))

Politisasi juga dapat terjadi melalui narasi publik. Misalnya, ketika inflasi meningkat akibat harga pangan atau energi global, bank sentral dapat dituduh tidak pro-pertumbuhan apabila menaikkan suku bunga. Ketika nilai tukar melemah akibat arus modal keluar global, bank sentral dapat dituntut mempertahankan kurs pada tingkat tertentu dengan segala cara. Padahal, mempertahankan kurs secara artifisial dapat menguras cadangan devisa jika tidak didukung fundamental ekonomi. Kebijakan nilai tukar harus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas.

Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap BI tentu sah. Bank sentral tidak boleh menjadi lembaga yang kebal kritik. Namun, kritik harus berbasis data dan kerangka analisis, bukan tekanan politik yang mengarah pada instruksi kebijakan. DPR memiliki fungsi pengawasan, pemerintah memiliki fungsi

koordinasi, akademisi memiliki fungsi evaluasi, media memiliki fungsi kontrol publik. Tetapi keputusan instrumen moneter harus tetap berada pada otoritas profesional BI.

Pelajaran dari banyak negara menunjukkan bahwa ketika bank sentral kehilangan kredibilitas, biaya pemulihannya sangat mahal. Inflasi tinggi dapat menghancurkan tabungan masyarakat kecil, menurunkan upah riil, meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan, dan menciptakan ketidakpastian bisnis. Depresiasi mata uang yang tidak terkendali dapat memicu krisis neraca pembayaran. Krisis perbankan dapat memaksa pemerintah melakukan bailout dengan biaya fiskal besar. Dengan demikian, menjaga independensi BI adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan teknokrat.

7. UU P2SK dan Tantangan Mandat Ganda-Terbatas

UU P2SK memperbarui arsitektur sektor keuangan Indonesia. BPK mencatat bahwa undang-undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan secara luas, termasuk kelembagaan, perbankan, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, stabilitas sistem keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, literasi dan inklusi keuangan, serta akses pembiayaan UMKM. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#)) UU ini juga memperkuat hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan, terutama antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Dalam perspektif tata kelola, UU P2SK mengakui bahwa stabilitas moneter tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sistem keuangan. Krisis modern sering tidak dimulai dari inflasi barang konsumsi, tetapi dari gelembung aset, pembiayaan berisiko, mismatch valuta asing, shadow banking, atau kegagalan sistem pembayaran. Karena itu, bank sentral perlu memiliki instrumen makroprudensial dan koordinasi sistemik.

Bank Indonesia menyatakan bahwa UU P2SK menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola BI, termasuk peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja kelembagaan. ([Bank Indonesia](#)) Dalam kerangka tata kelola tersebut, Bank Indonesia merumuskan prinsip IKKAT: Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi. ([Bank Indonesia](#)) Prinsip ini penting karena UU P2SK memperbesar kebutuhan koordinasi tanpa menghilangkan kebutuhan independensi.

Tantangan muncul ketika frasa “mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan” ditafsirkan secara terlalu luas. Secara positif, frasa tersebut dapat berarti bahwa BI menjaga stabilitas agar pertumbuhan tidak rapuh; mengembangkan sistem pembayaran digital agar transaksi lebih efisien; memperkuat pasar uang agar pembiayaan lebih dalam; mendorong inklusi keuangan agar UMKM memperoleh akses; dan menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menghindari siklus kredit yang terlalu tajam. Namun, secara negatif, frasa tersebut dapat disalahartikan sebagai kewajiban BI untuk selalu melonggarkan kebijakan demi mengejar target pertumbuhan pemerintah.

Di sinilah diperlukan konsep **mandat ganda-terbatas**. Bank Indonesia boleh dan perlu mendukung pertumbuhan, tetapi dukungan tersebut harus berada dalam batas stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. BI bukan kementerian pembangunan, bukan badan perencanaan nasional, dan bukan lembaga fiskal. BI adalah bank sentral yang kontribusi utamanya terhadap pertumbuhan terletak pada stabilitas, kredibilitas, efisiensi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan mitigasi risiko sistemik.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa mandat ganda tidak selalu merusak independensi jika desain institusionalnya jelas. Federal Reserve Amerika Serikat memiliki mandat stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum, tetapi tetap memiliki independensi instrumen. Namun, mandat ganda juga dapat menimbulkan tekanan politik apabila target lapangan kerja atau pertumbuhan dijadikan alasan untuk menunda

pengetatan ketika inflasi meningkat. Karena itu, transparansi fungsi reaksi kebijakan menjadi penting: BI perlu menjelaskan bagaimana ia menimbang inflasi, nilai tukar, pertumbuhan, kredit, stabilitas keuangan, dan risiko global dalam setiap keputusan.

8. Transmisi Kebijakan BI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia memengaruhi pertumbuhan melalui beberapa saluran. Pertama, **saluran suku bunga**. Perubahan BI Rate memengaruhi suku bunga pasar uang, deposito, kredit, obligasi, dan keputusan konsumsi-investasi. Ketika BI menurunkan suku bunga dalam kondisi inflasi terkendali, kredit dapat meningkat dan investasi terdorong. Namun, ketika inflasi atau nilai tukar tertekan, BI dapat menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas.

Kedua, **saluran nilai tukar**. Nilai tukar rupiah memengaruhi daya saing ekspor, biaya impor, inflasi, dan beban utang valuta asing. Rupiah yang terlalu kuat dapat menekan ekspor, tetapi rupiah yang terlalu lemah dapat menaikkan inflasi dan beban korporasi. BI harus menjaga agar nilai tukar bergerak sesuai fundamental dan tidak mengalami volatilitas berlebihan.

Ketiga, **saluran ekspektasi**. Komunikasi BI mengenai inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi ekonomi memengaruhi ekspektasi pelaku pasar. Bank sentral yang kredibel sering tidak perlu bertindak ekstrem karena komunikasinya sudah memengaruhi perilaku pasar. Sebaliknya, bank sentral yang kredibilitasnya lemah harus menggunakan instrumen lebih keras.

Keempat, **saluran kredit dan makroprudensial**. BI dapat menggunakan kebijakan makroprudensial untuk memengaruhi perilaku kredit perbankan, misalnya melalui rasio pembiayaan, insentif likuiditas, atau kebijakan sektor prioritas. Instrumen ini relevan karena suku bunga saja tidak selalu cukup untuk mengarahkan kredit produktif. Namun, kebijakan makroprudensial harus tetap hati-hati agar tidak menciptakan kredit bermasalah.

Kelima, **saluran sistem pembayaran**. Digitalisasi sistem pembayaran, QRIS, BI-FAST, dan infrastruktur pembayaran lainnya menurunkan biaya transaksi, mempercepat perputaran uang, memperluas inklusi keuangan, dan membantu UMKM masuk ke ekonomi digital. Ini adalah bentuk dukungan BI terhadap pertumbuhan yang tidak mengorbankan stabilitas. Justru sistem pembayaran yang efisien memperkuat produktivitas nasional.

Keenam, **saluran stabilitas sistem keuangan**. Ketika sistem keuangan stabil, intermediasi berjalan baik. Bank berani menyalurkan kredit, investor percaya pada pasar keuangan, dan rumah tangga tidak panik menarik dana. Ketika sistem keuangan terguncang, pertumbuhan dapat jatuh tajam meskipun suku bunga rendah. Oleh sebab itu, stabilitas keuangan adalah prasyarat pertumbuhan.

Namun, semua saluran tersebut memiliki jeda waktu, ketidakpastian, dan efek samping. Kebijakan moneter bukan tombol ajaib untuk menaikkan pertumbuhan. Daoui dalam tinjauan literatur mengenai negara berkembang mencatat bahwa efektivitas kebijakan moneter terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk independensi operasional bank sentral, struktur keuangan, jeda transmisi, rigiditas, dan kondisi disequilibrium. ([arXiv](#)) Dengan demikian, terlalu membebani BI sebagai mesin pertumbuhan dapat menghasilkan ekspektasi yang tidak realistis.

9. Studi Kasus Naratif: Ketika Target Pertumbuhan Bertemu Stabilitas Rupiah

Bayangkan sebuah situasi kebijakan di Indonesia. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan tinggi untuk mempercepat penciptaan kerja. Program infrastruktur, hilirisasi, perumahan, pangan, dan digitalisasi diperluas. Belanja pemerintah meningkat, kredit diarahkan ke sektor produktif, dan dunia usaha didorong berekspansi. Secara politik, agenda ini menarik karena menjanjikan lapangan kerja dan optimisme nasional.

Namun, pada saat yang sama, kondisi global berubah. Harga minyak naik, dolar AS menguat, investor global menarik dana dari pasar negara berkembang, dan rupiah mengalami tekanan. Harga pangan domestik juga meningkat karena gangguan cuaca. Dalam situasi ini, pemerintah berharap BI menjaga bunga tetap rendah agar investasi tidak terganggu. Pelaku pasar, sebaliknya, menunggu sinyal apakah BI berani menjaga rupiah dan inflasi.

Jika BI terlalu tunduk pada tekanan pertumbuhan jangka pendek, ia mungkin menahan suku bunga terlalu rendah. Dampak awalnya tampak positif: kredit murah, pasar saham mungkin naik sementara, dan konsumsi bertahan. Tetapi jika pasar melihat BI tidak serius menjaga stabilitas, rupiah dapat melemah lebih lanjut. Pelemahan rupiah menaikkan biaya impor energi dan bahan baku. Inflasi naik. Rumah tangga miskin terkena dampak lebih berat karena proporsi belanja pangan dan energi mereka lebih besar. Investor menuntut imbal hasil obligasi lebih tinggi. Pemerintah akhirnya tetap menghadapi biaya utang yang naik.

Sebaliknya, jika BI menaikkan suku bunga secara terukur dan menjelaskan alasannya secara kredibel, pertumbuhan jangka pendek mungkin sedikit tertahan, tetapi risiko krisis lebih kecil. Rupiah lebih stabil, ekspektasi inflasi terkendali, dan investor melihat bahwa Indonesia memiliki institusi moneter yang profesional. Dalam jangka panjang, stabilitas ini menurunkan premi risiko dan mendukung investasi.

Kasus naratif ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan tidak selalu populer. Bank sentral sering berada pada posisi "tidak menyenangkan": jika menaikkan suku bunga, dikritik menghambat pertumbuhan; jika menurunkan suku bunga, dikritik memicu inflasi atau pelemahan rupiah; jika melakukan intervensi nilai tukar, dikritik menguras cadangan; jika tidak intervensi, dikritik membiarkan rupiah melemah. Karena itu, independensi dan komunikasi publik menjadi sangat penting. BI harus menjelaskan bahwa tujuan akhirnya bukan menahan pertumbuhan, melainkan menjaga agar pertumbuhan tidak berubah menjadi krisis.

10. Independensi, Akuntabilitas, dan Demokrasi Ekonomi

Dalam negara demokratis, lembaga independen sering menghadapi pertanyaan legitimasi: siapa yang mengawasi mereka? Bank sentral memiliki kewenangan besar yang memengaruhi bunga kredit, harga aset, nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan. Karena itu, independensi tidak boleh berarti isolasi dari publik. Independensi harus berjalan bersama akuntabilitas.

Akuntabilitas BI dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, **akuntabilitas hukum**, yaitu BI menjalankan mandat yang ditetapkan undang-undang. Kedua, **akuntabilitas kelembagaan**, yaitu laporan kepada DPR, audit oleh BPK, dan pelaporan publik. Ikhtisar UU BI menjelaskan bahwa BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK, hasilnya disampaikan kepada DPR, dan laporan keuangan diumumkan kepada publik melalui media massa. ([OJK Portal](#)) Ketiga, **akuntabilitas kebijakan**, yaitu penjelasan rutin mengenai alasan keputusan moneter, asesmen inflasi, nilai tukar, pertumbuhan, dan risiko global. Keempat, **akuntabilitas sosial**, yaitu edukasi publik agar masyarakat memahami mengapa stabilitas harga penting bagi kesejahteraan.

Demokrasi ekonomi tidak berarti semua keputusan teknis harus diputuskan secara politik. Dalam banyak bidang, demokrasi membutuhkan lembaga profesional yang dilindungi dari tekanan jangka pendek tetapi tetap bertanggung jawab kepada hukum dan publik. Pengadilan, lembaga audit, otoritas statistik, dan bank sentral adalah contoh institusi yang memerlukan kredibilitas teknis. Jika semuanya ditundukkan pada siklus politik, kebijakan menjadi tidak stabil.

Namun, bank sentral juga harus rendah hati secara institusional. Keputusan moneter memiliki dampak distribusional. Kenaikan suku bunga dapat membantu penabung dan menjaga inflasi, tetapi membebani debitur.

Stabilitas nilai tukar membantu importir dan pengendalian inflasi, tetapi dapat memengaruhi eksportir. Kebijakan makroprudensial dapat menahan risiko sistemik, tetapi membatasi ekspansi sektor tertentu. Karena itu, BI perlu menjelaskan trade-off kebijakan secara terbuka.

Kredibilitas BI bukan hanya ditentukan oleh independensi formal, tetapi juga kualitas analisis, konsistensi tindakan, integritas pimpinan, komunikasi publik, dan kemampuan berkoordinasi. Bank sentral yang independen tetapi tidak transparan dapat kehilangan kepercayaan. Bank sentral yang transparan tetapi tidak independen dapat dianggap tidak berdaya. Bank sentral yang independen, transparan, akuntabel, dan koordinatif memiliki peluang lebih besar menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan.

11. Hubungan BI dan Pemerintah: Koordinasi Tanpa Subordinasi

Hubungan antara BI dan pemerintah harus dipahami sebagai **koordinasi tanpa subordinasi**. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, belanja negara, pajak, subsidi, investasi publik, perlindungan sosial, dan reformasi struktural. BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan sesuai mandatnya. Keduanya harus berkoordinasi karena ekonomi adalah sistem yang saling terkait.

Koordinasi diperlukan dalam pengendalian inflasi pangan. Inflasi pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan suku bunga. Pemerintah harus memperbaiki produksi, distribusi, cadangan pangan, logistik, data stok, dan kebijakan impor. Pemerintah daerah perlu menjaga pasokan. BI dapat membantu melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, analisis harga, komunikasi ekspektasi, dan stabilisasi moneter. Dalam hal ini, koordinasi memperkuat kebijakan.

Koordinasi juga diperlukan dalam stabilitas sistem keuangan. Jika terjadi tekanan likuiditas di perbankan atau pasar keuangan, BI, OJK, LPS, dan

Kementerian Keuangan harus bekerja bersama. UU P2SK memang dirancang untuk memperkuat koordinasi sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#)) Tanpa koordinasi, krisis kecil dapat menjadi sistemik karena otoritas bergerak sendiri-sendiri.

Namun, koordinasi berbeda dari subordinasi. Koordinasi berarti berbagi informasi, menyelaraskan timing, memahami dampak lintas kebijakan, dan membangun respons bersama. Subordinasi berarti keputusan BI ditentukan oleh preferensi politik pemerintah atau DPR. Koordinasi sehat; subordinasi berbahaya. Koordinasi memperkuat kredibilitas; subordinasi melemahkan kredibilitas.

Dalam praktiknya, batas antara koordinasi dan intervensi dapat kabur. Misalnya, pemerintah dapat meminta BI mendukung program perumahan melalui kebijakan likuiditas. Selama BI menilai kebijakan tersebut konsisten dengan stabilitas dan risiko sistemik terkendali, dukungan tersebut dapat dibenarkan. Namun, jika BI dipaksa mengarahkan kredit ke sektor tertentu tanpa mempertimbangkan risiko, maka kebijakan tersebut dapat merusak kualitas kredit dan stabilitas keuangan.

Prinsip yang perlu dijaga adalah: pemerintah menetapkan arah pembangunan; BI menjaga stabilitas dan memilih instrumen sesuai mandat; koordinasi dilakukan secara transparan; setiap kebijakan dievaluasi berdasarkan data; dan tidak ada instruksi politik terhadap keputusan moneter teknis.

12. Pertumbuhan 8 Persen dan Realitas Kebijakan Moneter

Dalam wacana pembangunan Indonesia, target pertumbuhan tinggi sering muncul sebagai aspirasi nasional. Pertumbuhan sekitar 8% per tahun, misalnya, dipandang perlu untuk mempercepat lompatan menuju negara berpendapatan tinggi. Aspirasi tersebut sah dan penting. Namun, pertanyaan akademiknya adalah: apakah target pertumbuhan tinggi dapat

dicapai melalui pelonggaran moneter? Jawabannya: tidak cukup, dan bahkan berisiko jika tidak didukung produktivitas.

Pertumbuhan 8% membutuhkan peningkatan besar dalam investasi produktif, produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, industrialisasi, teknologi, ekspor bernilai tambah, efisiensi logistik, reformasi regulasi, dan kepastian hukum. Kebijakan moneter dapat menciptakan lingkungan stabil, tetapi tidak dapat menciptakan produktivitas secara langsung. Suku bunga rendah dapat mendorong investasi hanya jika pelaku usaha melihat peluang keuntungan, kepastian hukum, infrastruktur memadai, SDM berkualitas, dan permintaan pasar yang kuat.

Jika pertumbuhan tinggi dikejar melalui ekspansi kredit tanpa produktivitas, risiko yang muncul adalah misalokasi modal. Kredit dapat mengalir ke properti spekulatif, konsumsi tidak produktif, atau proyek yang tidak layak secara ekonomi. Dalam jangka pendek, PDB naik. Dalam jangka menengah, kredit bermasalah meningkat dan bank memperketat pembiayaan. Siklus boom-bust seperti ini justru merusak pertumbuhan.

Oleh karena itu, politik pertumbuhan harus diarahkan pada **supply-side transformation**, bukan hanya **demand-side stimulus**. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasional, riset dan inovasi, digitalisasi UMKM, infrastruktur logistik, transisi energi, reformasi pertanian, hilirisasi industri, dan tata kelola investasi. Bank Indonesia mendukung melalui stabilitas inflasi, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan kebijakan makroprudensial. Dengan pembagian peran seperti ini, target pertumbuhan tinggi menjadi lebih realistis dan tidak mengorbankan stabilitas.

Data pertumbuhan 2025 dan triwulan I 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5%–5,6%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Untuk melompat ke tingkat yang jauh lebih tinggi, Indonesia membutuhkan perubahan struktural, bukan hanya perubahan suku bunga. Dengan kata lain, BI dapat membantu menciptakan “iklim makro” yang

stabil, tetapi “mesin pertumbuhan” harus dibangun oleh sektor riil, inovasi, investasi, dan produktivitas.

13. Risiko Nilai Tukar, Inflasi, dan Kepercayaan Investor

Independensi BI sangat erat dengan kepercayaan investor. Dalam ekonomi terbuka, arus modal bergerak cepat. Investor domestik dan asing menilai bukan hanya angka pertumbuhan, tetapi juga kredibilitas kebijakan. Ketika ada persepsi bahwa bank sentral kehilangan independensi, pasar dapat merespons melalui pelemahan mata uang, kenaikan yield obligasi, penurunan harga aset, atau arus modal keluar.

Laporan Reuters pada Juni 2026 menunjukkan bahwa perkembangan legislasi yang memperluas mandat BI menimbulkan perhatian pasar mengenai independensi bank sentral, terutama karena ada kekhawatiran mengenai pengaruh politik terhadap lembaga keuangan independen. ([Reuters](#)) Reuters juga melaporkan bahwa BI dan otoritas fiskal berupaya memperkuat daya tarik aset rupiah untuk membantu stabilisasi mata uang di tengah tekanan pasar. ([Reuters](#)) Terlepas dari perkembangan detail kebijakan, pesan akademiknya jelas: persepsi terhadap independensi BI dapat memengaruhi harga aset dan stabilitas pasar.

Kepercayaan investor bukan tujuan yang berdiri sendiri, tetapi instrumen untuk membiayai pembangunan. Indonesia membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, industri, energi, digitalisasi, pendidikan, kesehatan, dan transisi hijau. Jika investor meminta premi risiko tinggi karena khawatir terhadap politisasi moneter, biaya pembiayaan nasional meningkat. Pemerintah harus membayar bunga lebih mahal; perusahaan menghadapi biaya modal lebih tinggi; proyek produktif menjadi kurang layak.

Inflasi juga berkaitan dengan kepercayaan. Sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 menunjukkan komitmen BI dan pemerintah untuk menjaga harga dalam kisaran terukur. ([Bank Indonesia](#)) Jika kebijakan pertumbuhan dianggap mengabaikan sasaran inflasi, rumah tangga dan pelaku usaha

dapat mengubah perilaku harga. Dalam ekonomi modern, ekspektasi sering sama pentingnya dengan kondisi aktual. Inflasi dapat naik bukan hanya karena uang beredar, tetapi karena orang percaya harga akan naik.

Nilai tukar rupiah memiliki dimensi psikologis dan politik. Rupiah bukan hanya variabel ekonomi, melainkan simbol kedaulatan. Pelemahan rupiah sering memicu kecemasan publik. Namun, mempertahankan nilai tukar tidak boleh dilakukan secara kaku. BI perlu menjaga stabilitas, tetapi juga membiarkan fleksibilitas yang mencerminkan fundamental. Independensi memungkinkan BI mengambil keputusan berdasarkan data, bukan semata tekanan opini publik.

14. Perspektif Keadilan Sosial: Stabilitas Moneter untuk Rakyat Kecil

Sering kali independensi bank sentral dipandang sebagai isu elitis, seolah-olah hanya penting bagi pasar keuangan. Pandangan ini keliru. Stabilitas moneter justru sangat penting bagi masyarakat kecil. Inflasi tinggi adalah pajak tersembunyi yang paling berat bagi kelompok berpendapatan rendah. Mereka tidak memiliki instrumen lindung nilai, aset finansial kompleks, atau kemampuan menaikkan pendapatan secepat kenaikan harga. Ketika harga pangan, energi, dan transportasi naik, rumah tangga miskin langsung terdampak.

Nilai tukar yang tidak stabil juga berdampak pada rakyat. Banyak barang konsumsi dan input produksi Indonesia memiliki kandungan impor. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan harga obat, bahan bakar, pupuk, bahan pangan impor, mesin, dan teknologi. Akibatnya, biaya hidup naik dan biaya produksi UMKM meningkat. Dengan demikian, menjaga stabilitas rupiah bukan kebijakan pro-pasar semata, tetapi kebijakan perlindungan sosial.

Suku bunga juga memiliki dimensi keadilan. Suku bunga terlalu tinggi dapat membebani pelaku usaha kecil dan debitur. Namun, suku bunga terlalu rendah dalam kondisi inflasi tinggi dapat merugikan penabung kecil

dan mendorong spekulasi aset. Tugas BI adalah mencari keseimbangan, bukan mengikuti tekanan satu kelompok saja. Independensi membantu BI menimbang kepentingan jangka panjang seluruh masyarakat.

Dalam konteks pembangunan inklusif, BI dapat memainkan peran penting melalui digitalisasi pembayaran dan inklusi keuangan. Sistem pembayaran yang murah dan cepat membantu pedagang kecil, UMKM, pasar tradisional, dan ekonomi informal masuk ke ekosistem digital. Ini adalah contoh bagaimana bank sentral mendukung pertumbuhan inklusif tanpa harus mengorbankan stabilitas moneter.

15. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, Indonesia perlu menegaskan kembali bahwa independensi Bank Indonesia adalah aset nasional. Independensi bukan privilese institusi, melainkan mekanisme perlindungan publik dari inflasi, depresiasi berlebihan, dominasi fiskal, dan politisasi kebijakan. Setiap perubahan regulasi harus diuji berdasarkan apakah ia memperkuat atau melemahkan kredibilitas BI.

Kedua, mandat mendukung pertumbuhan harus diterjemahkan secara hati-hati sebagai dukungan terhadap **pertumbuhan berkelanjutan**, bukan pertumbuhan jangka pendek. BI dapat mendukung pertumbuhan melalui stabilitas, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, inklusi keuangan, dan koordinasi inflasi. Namun, BI tidak boleh menjadi instrumen pembiayaan defisit atau alat politik suku bunga rendah.

Ketiga, koordinasi BI dan pemerintah harus diperkuat tetapi diformalkan dengan prinsip transparansi. Setiap koordinasi besar yang berdampak pada pasar perlu dikomunikasikan secara jelas agar publik memahami peran masing-masing lembaga. Koordinasi yang transparan mengurangi spekulasi bahwa BI berada di bawah tekanan politik.

Keempat, akuntabilitas BI harus terus ditingkatkan. BI perlu memperluas komunikasi publik yang mudah dipahami masyarakat, bukan hanya laporan teknis untuk pasar keuangan. Edukasi mengenai inflasi, nilai tukar, suku bunga, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan perlu diperkuat agar publik memahami mengapa keputusan bank sentral kadang tidak populer tetapi diperlukan.

Kelima, pemerintah perlu memikul tanggung jawab utama atas reformasi struktural. Target pertumbuhan tinggi tidak dapat dibebankan kepada BI. Pemerintah harus memperbaiki produktivitas, kualitas SDM, investasi, inovasi, industrialisasi, tata kelola, infrastruktur, dan kepastian hukum. Jika sektor riil kuat, BI tidak perlu dipaksa melakukan stimulus berlebihan.

Keenam, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan orientasi kelembagaan jangka panjang. Pengawasan terhadap BI penting, tetapi harus diarahkan pada akuntabilitas, integritas, dan evaluasi mandat, bukan instruksi kebijakan teknis. Parlemen dapat memperkuat independensi dengan memastikan proses pemilihan pimpinan BI berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional.

Ketujuh, perlu dikembangkan indikator evaluasi yang membedakan antara keberhasilan stabilitas dan keberhasilan pertumbuhan. BI tidak boleh dinilai hanya dari pertumbuhan PDB, karena banyak faktor pertumbuhan berada di luar kendali bank sentral. BI lebih tepat dinilai dari inflasi, stabilitas nilai tukar, kredibilitas kebijakan, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan efektivitas transmisi kebijakan.

16. Penutup

Independensi Bank Indonesia dan politik pertumbuhan ekonomi nasional bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling memperkuat apabila ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang tepat. Pertumbuhan membutuhkan stabilitas; stabilitas membutuhkan institusi

yang kredibel; kredibilitas membutuhkan independensi; dan independensi membutuhkan akuntabilitas.

Bank Indonesia tidak boleh menjadi lembaga yang terisolasi dari kebutuhan pembangunan nasional. Namun, BI juga tidak boleh menjadi instrumen politik pertumbuhan jangka pendek. Peran terbaik BI adalah menjaga nilai rupiah, inflasi, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan agar pemerintah, dunia usaha, UMKM, investor, dan masyarakat dapat membangun ekonomi dengan kepastian yang lebih besar.

Dalam jangka panjang, bangsa yang ingin tumbuh tinggi harus menghormati disiplin institusi. Pertumbuhan yang dipaksakan melalui pelanggaran moneter tanpa produktivitas hanya menciptakan ilusi. Sebaliknya, pertumbuhan yang dibangun di atas stabilitas, kredibilitas, inovasi, dan produktivitas akan lebih tahan terhadap gejolak global. Karena itu, menjaga independensi Bank Indonesia bukan sekadar isu kelembagaan, melainkan bagian dari strategi besar membangun ekonomi nasional yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban lembaga publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka dasar keputusan kepada masyarakat, DPR, auditor, dan pemangku kepentingan.

Bank Indonesia

Bank sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dominasi fiskal

Kondisi ketika kebijakan moneter dipaksa mengikuti kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah, sehingga stabilitas harga dan nilai tukar dapat terganggu.

Independensi bank sentral

Kebebasan bank sentral menjalankan mandat dan memilih instrumen kebijakan tanpa campur tangan politik jangka pendek, dengan tetap tunduk pada hukum dan akuntabilitas publik.

Independensi instrumen

Kewenangan bank sentral memilih alat kebijakan, seperti suku bunga, operasi moneter, atau kebijakan makroprudensial, untuk mencapai mandat yang telah ditetapkan.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menurunkan daya beli uang.

Kebijakan makroprudensial

Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk mengelola risiko kredit, likuiditas, dan siklus keuangan.

Kebijakan moneter

Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, likuiditas, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi.

Koordinasi kebijakan

Proses penyelarasan informasi dan tindakan antarotoritas, seperti BI, pemerintah, OJK, dan LPS, tanpa menghilangkan mandat masing-masing.

Mandat bank sentral

Tujuan dan tugas yang diberikan undang-undang kepada bank sentral, misalnya stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, sistem pembayaran, atau stabilitas keuangan.

Nilai tukar

Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar AS.

Politik pertumbuhan ekonomi

Dinamika politik, kebijakan, dan kepentingan yang muncul dalam upaya negara mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas sistem keuangan

Kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan berfungsi baik serta mampu menyerap guncangan.

Time inconsistency

Masalah ketika pembuat kebijakan tergoda memilih kebijakan jangka pendek yang tampak menguntungkan tetapi merusak kredibilitas dan stabilitas jangka panjang.

UU P2SK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memperbarui kerangka regulasi sektor keuangan Indonesia.

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance: Some comparative evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 25(2), 151–162.

<https://doi.org/10.2307/2077833>

Andriani, Y., & Gai, P. (2013). The effect of central bank independence on price stability: The case of Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15(4), 367–390. <https://doi.org/10.21098/bemp.v15i4.72>

- Arnove, M., Laurens, B. J., Segalotto, J. F., & Sommer, M. (2009). Central bank autonomy: Lessons from global trends. *IMF Staff Papers*, 56(2), 263–296. <https://doi.org/10.1057/imfsp.2008.25>
- Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 101–121. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(83\)90051-X](https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90051-X)
- Berger, H., de Haan, J., & Eijffinger, S. C. W. (2001). Central bank independence: An update of theory and evidence. *Journal of Economic Surveys*, 15(1), 3–40. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00131>
- Bodea, C., & Hicks, R. (2015). Price stability and central bank independence: Discipline, credibility, and democratic institutions. *International Organization*, 69(1), 35–61. <https://doi.org/10.1017/S0020818314000277>
- Crowe, C., & Meade, E. E. (2008). Central bank independence and transparency: Evolution and effectiveness. *European Journal of Political Economy*, 24(4), 763–777. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.06.004>
- Cukierman, A. (2008). Central bank independence and monetary policymaking institutions: Past, present and future. *European Journal of Political Economy*, 24(4), 722–736. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.07.007>
- Cukierman, A., Webb, S. B., & Neyapti, B. (1992). Measuring the independence of central banks and its effect on policy outcomes. *The World Bank Economic Review*, 6(3), 353–398. <https://doi.org/10.1093/wber/6.3.353>
- Garriga, A. C. (2016). Central bank independence in the world: A new data set. *International Interactions*, 42(5), 849–868. <https://doi.org/10.1080/03050629.2016.1188813>
- Garriga, A. C., & Rodriguez, C. M. (2020). More effective than we thought? Central bank independence and inflation in developing countries. *Economic Modelling*, 85, 87–105. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.009>

Hartwell, C. A. (2019). On the impossibility of central bank independence: Four decades of time- and intellectual inconsistency. *Cambridge Journal of Economics*, 43(1), 61–84. <https://doi.org/10.1093/cje/bex083>

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473–491. <https://doi.org/10.1086/260580>

Lohmann, S. (1992). Optimal commitment in monetary policy: Credibility versus flexibility. *The American Economic Review*, 82(1), 273–286.

Rogoff, K. (1985). The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target. *The Quarterly Journal of Economics*, 100(4), 1169–1189. <https://doi.org/10.2307/1885679>

Svensson, L. E. O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. *European Economic Review*, 41(6), 1111–1146. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(96\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(96)00055-4)

Tambunan, T. T. H. (2010). The Indonesian experience with two big economic crises. *Modern Economy*, 1(3), 156–167. <https://doi.org/10.4236/me.2010.13018>

Bank Indonesia. (2026). *Inflation target*.

Bank Indonesia. (2026). *Governance Bank Indonesia*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent (y-on-y)*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 9 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a280fda-1b80-83ec-aed7-1e13ec0e1186>